

Volume 10 No. 01, 2015

Tela'ah

ISSN 0852-1204



Jurnal Penelitian Sosial
dan Keagamaan

**KONSEPSI SEMANTIK SYEKH NAWAWI
DALAM TAFSIR *MARAH LABID***
Aang Saeful Milah

**KONTEKSTUALITAS *TAFSIR AL-MIZAN FI TAFSIR AL-QUR'AN*
KARYA SAYYID MUHAMMAD HUSIN THABATHABA'I**
(Studi Tafsir atas Ayat-Ayat Hukum)
Fauzul Iman

**MANAJEMEN PEMBERDAYAAN GURU MADRASAH ALIYAH
(Studi Pada Tiga Madrasah Aliyah Negeri di Banten)**
Anis Fauzi

**ANALISIS BALAGAH TERHADAP PENAFSIRAN IBNU QUTAIBAH
TENTANG AYAT-AYAT TEOLOGIS DALAM KITAB
TA'WIL MUSYKIL AL-QUR'AN DAN *GARIB AL-QUR'AN***
Lalu Turjiman Ahmad

**POLITIK DAN AGAMA (STUDI POLITISI PEREMPUAN
DALAM PANDANGAN MASYARAKAT BANTEN)**
Ilah Holilah

**ANALISIS *AKAD MURABAHAH* PERBANKAN SYARIAH
DI WILAYAH SERANG DALAM UPAYA PENGUATAN EKONOMI ISLAM**
Oom Mukarromah

**POLA KOMUNIKASI TAREKAT DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA
(Studi Thariqah Qadiriyyah Naqsyabandiyah
di Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten)**
Eneng Purwanti

**GENEALOGI ULAMA BANTEN
MASA PERGERAKAN NASIONAL: STUDI PONDOK PESANTREN
MASYARIQUL ANWAR & MATHLAUL ANWAR**
Subhan

**KONSEP DIRI GURU-GURU DI PROVINSI BANTEN; Survei Terhadap
Guru-guru Peserta Program Dual Mode System Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**
Saefudin Zuhri



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Tela'ah	Vol. 10	No.01	Hal. 1-171	Serang Januari-Juni 2015	ISSN 0852-1204
---------	---------	-------	------------	-----------------------------	-------------------

ISSN 0852-1204

Tela'ah

Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan
Vol. 10 No. 01 Januari-Juni 2015

=====

Susunan Dewan Penyunting Tela'ah:

Penanggung Jawab:

Rektor IAIN
Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Redaktur:

Wazin Baihaqi

Penyunting:

Helmi Faizy Bahrul Ulumi
Ayatullah Humaeni

Redaktur Pelaksana:

Ade Jaya Suryani

Sekretaris:

Nuraini

Distribusi:

Ilis Nuraisyah
Hadlani

Tela'ah, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan ISSN 085-1204, memuat hasil penelitian dalam bidang sosial dan keagamaan, diterbitkan enam bulan sekali oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terbit pertama kali berdasarkan SK. Rektor No.: In.10/H.K.00.5/550/2007 tanggal 16 Februari 2007.



Pusat Penelitian Dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada
Masyarakat (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,
Gedung Rektorat Lt. III, Jl. Jend. Sudirman No. 30
Serang-Banten 42118, Telp. [0254] 200323,
208849, Fax. [0254] 200022
<http://www.lemlit.iainbanten.ac.id>

Daftar Isi

KONSEPSI SEMANTIK SYEKH NAWAWI DALAM TAFSIR *MARAH LABID*

Aang Saeful Milah
1-13

KONTEKSTUALITAS *TAFSIR AL-MIZAN FI TAFSIR AL-QUR'ANKARYA SAYYID*

MUHAMMAD HUSIN THABATHABA'I
(Studi Tafsir atas Ayat-Ayat Hukum)
Fauzul Iman
14-41

MANAJEMEN PEMBERDAYAAN GURU MADRASAH ALIYAH (Studi Pada Tiga Madrasah Aliyah Negeri di Banten)

Anis Fauzi
42-57

ANALISIS BALAGAH TERHADAP PENAFSIRAN IBNU QUTAIBAH TENTANG AYAT-AYAT TEOLOGIS DALAM KITAB *TA'WIL MUSYKIL AL-QUR'ANDAN GARIB AL-QUR'AN*

Lalu Turjiman Ahmad
58-69

POLITIK DAN AGAMA (STUDI POLITISI PEREMPUAN DALAM PANDANGAN MASYARAKAT BANTEN)

Ilah Holilah
70-86

ANALISIS *AKAD MURABAHAH* PERBANKAN SYARIAH DI WILAYAH SERANG DALAM UPAYA PENGUATAN EKONOMI ISLAM

Oom Mukarromah
87-107

POLA KOMUNIKASI TAREKAT DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA (Studi Thariqah Qadiriyyah Naqsyabandiyah di Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Banten)

Eneng Purwanti
108-128

GENEALOGI ULAMA BANTEN MASA PERGERAKAN NASIONAL: STUDI PONDOK PESANTREN MASYARIQUL ANWAR & MATHLAUL ANWAR

Subhan
129-147

KONSEP DIRI GURU-GURU DI PROVINSI BANTEN; Survei Terhadap Guru-guru Peserta Program Dual Mode System Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Saefudin Zuhri
148-171

POLITIK DAN AGAMA
(STUDI POLITISI PEREMPUAN
DALAM PANDANGAN MASYARAKAT BANTEN)

Ilah Holilah

Dosen Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab
IAIN Sultan Maulana hasanuddin Banten

Abstract

In the recent reformation era has been giving a wide chances to women for taking role and side by side work with their male peers, either in human rights context, democracy, or even gender equality. There are regulations support female role in politics. However there was question on how far this regulation has an implication in rural area. Thereof, the resarch aimed to describe female politicians in provinsial legislative board of Banten. Based on survey conducted, showed that people of banten tend to vote for male politicians rather than female politicians. By far this fact based on: 1. Males are more suitable for becoming a leader.2. religious reason.3. males are easily to be famous.4. males are comunicative and charming,5. Males have more time to work. Other answer found in this surveys revealed that women more suitable for taking care household and religious oeder told to do so.

Keywords: politics, religion, politicians, Banten

Abstrak

Pada era reformasi sekarang ini, memberi peluang yang lebih luas dan lebih baik terhadap perempuan untuk berperan sejajar dan bermitra dengan kaum laki-laki, baik dalam konteks isu hak asasi manusia, demokratisasi maupun keadilan dan kesetaraan gender. Telah banyak perundang-undangan maupun peraturan lain yang mendorong kaum perempuan untuk berkiprah lebih luas dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam kehidupan berpolitik. Akan tetapi perubahan-perubahan di era ereformasi tersebut seberapa jauh berpengaruh sampai kepada tingkal atau daerah tentang peran politik perempuan. Oleh karenanya dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang politisi perempuan di DPRD Propinsi Banten. Berdasarkan hasil survey bahwa sebagian besar masyarakat Banten baik laki-laki maupun perempuan memilih politisi laki-laki yang

pantas menjadi politisi, dengan alasan; pertama, laki-laki pantas untuk menjadi pemimpin. Kedua, alasan agama yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Ketiga, karena lebih dikenal. Keempat, lebih komunikatif serta berwibawa, dan kelima, mempunyai waktu yang cukup untuk mobilisasi dan mobilitas. Sedangkan alasan sebaian informan tidak memilih politisi perempuan dengan alasan; pertama, atas anjuran agama. Kedua, tidak banyak dikenal. Ketiga, cukup mengurus rumah saja. Keempat, kurang sosialisasi dan kelima, pemimpin harus laki-laki.

Kata Kunci: politik, agama, politisi perempuan, Banten

A. Pendahuluan

Peran kaum perempuan dalam dunia politik di Indonesia sudah ada sejak lama, sejak masa kolonialisme sampai kemerdekaan, dengan memperlihatkan pasang surut yang cukup dinamis. Pada saat sebelum kemerdekaan, yaitu pada saat pembentukan BPUPKI dua orang diantaranya adalah perempuan dari 68 anggota, yaitu Ny.Maria Ulfah Santoso dan Ny.RSS Soenarjo Mangoenpoespito. Demikian pula di masa pemerintahan kabinet Syahrir, seorang perempuan bernama Ny.Maria Ulfah Santoso diangkat menjadi Menteri Sosial. Pada tahun 1947 di masa pemerintahan kabinet Amir Syarifudin, Ny.SK Trimurti diangkat sebagai Menteri Perburuhan.

Pada era reformasi sekarang ini, memberi peluang yang lebih luas dan lebih baik terhadap perempuan untuk berperan sejajar dan bermitra dengan kaum laki-laki, baik dalam konteks isu hak asasi manusia, demokratisasi maupun keadilan dan kesetaraan gender. Telah banyak perundang-undangan maupun peraturan lain yang mendorong kaum perempuan untuk berkiprah lebih luas dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam kehidupan berpolitik. Akan tetapi perubahan-perubahan di era ereformasi tersebut seberapa jauh berpengaruh sampai kepada tingkal atau daerah tentang peran politik perempuan.

Oleh karenanya dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang politik perempuan ditingkat lokal dengan mengambil wilayah penelitian propinsi Banten dengan alasan; *pertama*, propinsi Banten merupakan propinsi penyanggah ibu kota, sehingga pengaruh perubahan di ibu kota negara yakni Jakarta akan cepat mempengaruhi masyarakat Banten. *Kedua*,

Propinsi Banten merupakan propinsi yang sangat kental dengan nilai religiusnya terutama pengaruh Islam. *Ketiga*, di era reformasi propinsi Banten merupakan propinsi yang pertama dipimpin oleh seorang Gubernur perempuan.

B. Rumusan Masalah

Apakah agama dijadikan referensi pemilih dalam Memilih Politisi Perempuan di Propinsi Banten

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi kepada para anggota DPRD Perempuan di Propinsi Banten periode 2009-2014.

D. Kajian Pemikiran Tentang Politik

Beberapa pemikir Islam yang mengkaji soal politik diantara yaitu;

a. Ibnu Khaldun

Beliau lahir tahun 1332 dan wafat tahun 1406. Dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menulis bahwa kerajaan dan dinasti hanya bisa ditegakkan atas bantuan solidaritas rakyat, karena kemenangan terdapat di pihak yang memiliki solidaritas lebih kuat, dan anggota-anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati demi kepentingan bersama.¹

b. Hasan Al Bana

Hasan Al Bana lama tinggal di Ismailiyah dan mendirikan Ikhwanul Muslimin (IM). Bagi IM partai politik apapun dapat berdiri dengan nuansa budaya daerah dan negara masing-masing harus berpedoman terhadap Al-Qur'an dan Al-hadist.² Al Bana terkenal dengan partainya yang jujur dan diminati anak-anak muda pada pemilu 1999 dan 2004. Namun pada pemilu pertama pasca reformasi partai ini tidak memenuhi syarat untuk jumlah pemilih yang dipersyaratkan sehingga bergabung dengan Partai Amanah Nasional.

c. Ayatullah Rohullah Khomeini

Lahir di kota Khomein pada tanggal 9 Nopember 1902, 300 meter dari kota Teheran. Pemikir Islam politik dan pelaku politik di Iran ini. Buku karangan Khomeini yaitu berjudul *Kashf al Asrar dan Towzihol Masa'el* (penjelasan berbagai masalah) adalah karya-karya pemikiran yang tidak lepas

¹Inu Kencana Syaferi, *Ilmu Politik*, Rineka Cipta, 2010

²Inu Kencana Syaferi, hal. 114

dari pemikiran politik Islam. Figur Khomeini tidak hanya pemikir tetapi sekaligus sebagai pelaku dan praktisi politik Islam yang disegani oleh lawan dan kawan politik.

Ketiga pemikir dan praktisi politik Islam internasional menjadi bahan referensi penting tentang hubungan politik, negara dan Islam. Al Bana dalam hal ini lebih moderat dan menjadikan partainya disegani dan menjadi pilihan anak-anak muda di Mesir. Sementara Ibnu Khaldun lebih normatif dan konservatif sedangkan Imam Khoemini lebih progresif.

1. Politik

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik³. Mengapa politik penting? Karena sejak dulu masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya gar semua warga merasa bahagia dan puas.

Persoalannya bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut? Jawabannya adalah dengan memakai instrumen kekuasaan di wilayah tertentu. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada.⁴ Dengan demikian kita simpulkan bahwa politik dalam suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*) pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation of distribution*).

Peter Merkl berpendapat, "*politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (politics, at its best is a noble quest for a good order and justice)*"⁵. Miriam Budiardjo berpendapat, pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

³Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT Gramedia, 2013, h.13

⁴Miriam hal. 14

⁵Peter Merkl, *Continuity and Change* (New York: Herper and Row, 1967), h. 13

Citra politik yang mulia, dalam pelaksanaannya acapkali dihadapkan pada benturan antar kepentingan dan tidak lepas dari tabiat sifat manusia itu sendiri. Peter Merkl merumuskan: politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches).⁶

Politik menjadi alat untuk meraih kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku⁷. Jadi politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (power struggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara lain, secara langsung tidak langsung. Kegiatan ini mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersuar atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk memberi keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*).⁸

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berendidikan yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang yang terkemuka. Pada muanya di Eropa hanya elite masyarakat saja yang diwakili dalam perwakilan. Di Amerika, perempuan baru mempunyai hak suara setelah adanya amandemen ke-19 pada tahun 1920. Tetapi perlahan-

⁶Peter Merkl, *Continuity and Change*. H. 13

⁷Miriam Budiardjo, hal.18

⁸Miriam Budiardho, h. 368

lahan keinginan untuk berpartisipasi menjangkau semua sektor masyarakat laki-laki dan perempuan dan mereka menuntut hak untuk bersuara.⁹

E. Metodologi Penelitian

Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian Kualitatif-Verifikatif.

1. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Albert Wijaya dan Noeng Muhajir¹⁰ bahwa penelitian kualitatif dimaksud adalah penelitian dengan mengandalkan konstruksi logika dan penggalan interpretatif berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi atau bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dan masalah studi ini. Pendekatan penelitian kualitatif umumnya meletakkan peneliti pada pandangan fenomenologis di mana peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan keterkaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu.¹¹

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor¹² mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dengan demikian, format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan dukungan masyarakat kepada suatu kelompok, permasalahan tingkah laku konsumen suatu produk, masalah masalah efek media terhadap pandangan pemirsa terhadap suatu tayangan media, permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat dan sebagainya.

⁹Miriam Budiardjo, h. 369

¹⁰ Albert Wijaya dan Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990) hlm. 66

¹¹ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) hlm 9

¹² Lexi Moleong, *Ibid.*, hlm. 3

2. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan langsung, melihat, dan meneliti kepada suatu objek yang diteliti serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang dianggap memiliki kapasitas kualitas informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab langsung antara peneliti dan objek penelitian, mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.

c. Kajian Pustaka

Teknik ini digunakan untuk memperkuat referensi dan perspektif terhadap tema yang sedang diteliti. Kajian pustaka merupakan teknik analisis literatur dan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitiannya.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan melalui multi level analisis (*multi level analysis*) dan analisis historis-holistik. Hal ini didasarkan atas tiga pertimbangan utama. *Pertama*, metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan gejala yang kompleks. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹³

Analisis terhadap data kualitatif merupakan sumber data yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Penggunaan data kualitatif diharapkan dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.¹⁴

¹³ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.* hlm 4

¹⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1992) hlm. 1-2. Lihat juga uraian secara rinci dan jelas tentang berbagai paradigma ilmu pengetahuan, pendekatan penelitian dan perbandingan model analisis

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perempuan dalam Konsep Gender

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris secara harfiah “ gender “ berarti jenis kelamin, sama halnya dengan seks yang juga jenis kelamin. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dengan seks. Seks mengacu pada pengertian perbedaan biologis jenis kelamin yang merupakan kodrat Tuhan karenanya bersifat permanen serta tidak dapat dipertukarkan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi yang bersumber pada nilai sosial budaya, pada berbagai golongan atau kelompok masyarakat, memiliki identitas yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor ideologi, politik, ekonomi, sejarah, agama, budaya, adat istiadat dan etnik serta berubah ubah menurut waktu, tempat, lingkungan dan kemajuan. Nilai sosial budaya menentukan peranan stereotip, yaitu peranan yang dianggap cocok bagi laki-laki dan perempuan, sesuai dengan sifat-sifat biologis masing-masing didalam pembangunan termasuk kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sering menimbulkan kesenjangan hubungan laki-laki dan perempuan. Terdapat beberapa teori gender yang akan diuraikan lebih lanjut, yaitu teori fungsional-struktural, teori konflik, teori feminis dan teori sosial-biologis.

2. Gender Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, perempuan bisa sejajar dengan laki-laki jika dilihat dari kaca mata spiritualitas ketuhanan. Pendirian ini, sekurang-kurangnya, tampak dalam ayat: QS. *Al-Hujurat* [49]: 13). (QS. *An-Nahl* [16]: 97). Perempuan juga bisa lebih tinggi di atas laki-laki. Pandangan ini berlaku untuk laki-laki sebagai anak kepada perempuan sebagai ibu. Dalam salah satu Hadits Nabi, dikatakan: “*Ridlallāhi fi ridla al-wālidain wa sukhhullāhi fi sukhhithi al-wālidain*/Perkenan Allah tergantung pada perkenan orang tua, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua.” Sementara itu, yang dimaksud dengan kedua orang tua sebagai pihak yang berhak memperoleh penghormatan dan kebaktian dari sang anak, pertama kali adalah orang tua perempuan (ibu), baru kemudian orang tua laki-laki (bapak).

Pendapat yang membolehkan perempuan berpolitik, argumentasinya sebagai berikut:

kualitatif dan kuantitatif dalam Dedy Nur Hidayat, *Metode Penelitian Kualitatif* (kumpulan Bahan kuliah), (Jakarta: PPS UI, 2003).

1. Pernyataan al-Qur'an tentang orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong atau ahlinya sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'rif dan mencegah yang mungkar (Al-Qur'an surat *AlTawbah/9:71*). Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar (al-Qur'an surat *al-Naml/27:23*), seorang perempuan adalah Ratu Balqis yang memerintah di negeri Saba'.
2. Hadis "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan" perlu diteliti sanadnya, dan hadis tersebut termasuk hadis *ahad*. Kalaupun dianggap *sahih* hendaknya ditempatkan pada konteks pengucapan Nabi yang berkaitan dengan tidak mampunya Buron binti Syiwaraih memimpin kerajaan Persia.

Menurut Fazlur Rahman, laki-laki bertanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka (laki-laki) memberi nafkah dari sebagian hartanya, bukanlah hakiki melainkan fungsional, artinya jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang.¹⁵

Sedangkan pendapat Aminah Wadud Muhsin, yang sejalan dengan Fazlur Rahman, menyatakan bahwa superioritas itu melekat pada setiap laki-laki *qawâmûn* atas perempuan, tidak dimaksudkan superior itu secara otomatis melekat pada setiap laki-laki, sebab hal itu hanya terjadi secara fungsional yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria Al-Qur'an yaitu memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Ayat tersebut tidak menyebut semua laki-laki otomatis lebih utama daripada perempuan.¹⁶

Demikian juga Ashgar Ali Engineer berpendapat bahwa *qawwâmûn* disebutkan sebagai pengakuan bahwa, dalam realitas sejarah kaum perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban, sementara laki-laki menganggap dirinya unggul, karena kekuasaan dan kemampuan mencari dan memberikannya kepada perempuan. *Qawwâmûn* merupakan pernyataan kontekstual bukan normatif, seandainya al-Qur'an menghendaki laki-laki sebagai *qawwâmûn*, redaksinya akan menggunakan pernyataan normatif, dan pasti mengikat semua

¹⁵ Fazlurrahman, *Major Themes of The Quran*, Edisi Kedua, (Minneapolis: Biblioteca Islamica, 1989), dalam Edisi Indonesia, terjemahan Anas Mahyuddin, *Tema pokok Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1983), h. 72.

¹⁶ Aminah Wadud Muchsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 73.

perempuan dan semua keadaan, tetapi al-Qur`an tidak menghendaki seperti itu.¹⁷

Uraian di atas menunjukkan sesungguhnya posisi kaum laki-laki atas perempuan bersifat relatif tergantung pada kualitas masing-masing individu. Kesimpulan ini juga didukung fakta sejarah, baik pada masa Nabi Muhammad atau sebelumnya, sebagaimana tampak dalam kisah kekuatan mental yang dimainkan oleh Maryam, Ibu dari Nabi Isa as. Dari kisah ini dapat diambil suatu gambaran bahwa kekuatan emosional dalam menepis fitnah yang dilontarkan orang-orang pada saat itu menjadikan psikologis dia tetap tenang, tabah dan sabar sampai mereka mengetahui akan rahasia Allah SWT dibalik peristiwa lahirnya Nabi Isa as. Di masa Rasul juga terdapat banyak perempuan produktif. Sejarah mencatat dan mengabadikan beberapa nama besar di bidang pengembangan akademik, bidang medis, bidang militer, bidang seni dan budaya serta bidang bisnis.¹⁸

3. Kondisi Sosial-Budaya dan Ekonomi Propinsi Banten

Propinsi Banten merupakan pemekaran dari Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. Propinsi Banten terdiri dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Letak Geografis Wilayah Propinsi Banten yang luasnya 8.651,20 km, dan berada pada batas astronomisnya 10501'11" - 10607'12" BT dan 507'50" - 701'1" LS, mempunyai posisi strategis pada lintas perdagangan internasional dan nasional.¹⁹

Secara demografis bahwa Jumlah penduduk Propinsi Banten pada tahun 2000 adalah 8.252.312 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 8,74 jiwa/Ha. Laju pertumbuhan penduduk Propinsi Banten dari tahun 1995-2000 rata-rata sebesar 3,55 persen per tahun. Jumlah penduduk yang bekerja di Propinsi Banten pada tahun 2000 sebesar 2.790.353 orang. Sektor yang mempunyai daya serap tenaga kerja yang paling besar berturut-turut adalah sektor pertanian (27,94 persen), sektor perdagangan, perhotelan dan restoran (23,81 persen), sektor industri (18,86 persen), dan sektor jasa-jasa (15,33 persen). Di tahun 2000 persentase penduduk yang lulus SD sampai dengan jenjang S2 dan S3 untuk secara berturut-turut 59, 10, 50, dan 23, 63, 34 persen.²⁰

¹⁷ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terjemahan Farid Wadji dan Cici Farhan Assegaf, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), h. 179.

¹⁸ Haifa A Jawad, *Otoritas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, terjemahan Anni Hidayatun et al, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Buku, 2002), h. 72.

¹⁹ Banten dalam Angka, BPS Propinsi Banten 2010

²⁰ Ibid

Sosial-Budaya Banten melalui unsur-unsur kebudayaan, kiranya dapat digambarkan keberadaan Banten dari masa pertama dan perkembangannya kini. Secara deskriptif dapat dikemukakan sbb: Bahasa. bahasa penduduk yang pusat kekuasaan politiknya di Banten Girang, adalah bahasa Sunda. Sedangkan bahasa Jawa, dibawa oleh Syarif Hidayatullah, kemudian oleh puteranya, Hasanuddin, berbarengan dengan penyebaran agama Islam. pada gilirannya membentuk bahasa Jawa dengan dialek tersendiri dan bahasa Sunda juga dengan dialeknya sendiri. Pada akhirnya, bahasa Jawa Banten tetap berkembang meskipun keraton tiada lagi. Bahasa Jawa dimaksud dalam pengungkapannya menggunakan tulisan Arab (Pegon) Penggunaan aksara lama terdesak oleh huruf Arab setelah Islamisasi.

Agama Islam sebagai agama resmi keraton dan keseluruhan wilayah kesultanan, dalam upacara-upacaranya mempunyai sistem sendiri, yang meliputi peralatan upacara, pelaku upacara, dan jalannya upacara. Misalnya dalam upacara Salat, ada peralatan-peralannya dari sejak mesjid, bedug, tongtong, menara, mimbar, mihrab, padasan (pekulen), dan lain-lain. Demikian pula ada pelakunya, dari sejak Imam, makmum, tukang Adzan, berbusana, dan lain-lain; sampai kemudian tata cara upacaranya.

4. Dinamika Politik di Propinsi Banten

Banten memiliki posisi yang istimewa, yaitu sebagai penghubung antara Jawa dan Sumatera. Sehingga ada pengaruh dari kedua pulau tersebut, baik itu pengaruh budaya maupun preferensi politiknya. Menurut Claude Guillot (2008) dalam bukunya Banten, Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII, pada awalnya Banten didirikan oleh bangsawan dari kerajaan di Jawa Tengah yang berlatar Hindu pada abad ke-10. Pada tahun 1016, wilayah ini kemudian dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya yang berlatar budaya Melayu. Setelah itu, penguasanya berganti ke Pajajaran yang berpusat di Bogor sekitar tahun 1400. Pengaruh budaya Jawa kembali masuk Banten setelah wilayah ini dikuasai oleh Kerajaan Demak. Namun, kali ini Demak sekaligus juga "membawa" Islam.

Latar sejarah yang mendapat berbagai pengaruh budaya tersebut membuat masyarakat Banten terbuka akan perubahan. Di masa kini, perubahan budaya ini memengaruhi juga perubahan politik masyarakatnya. Perubahan politik ini dapat ditelusuri dari pemilihan umum yang terjadi sebelumnya. Pada Pemilu 1955, misalnya, wilayah yang waktu itu masih bergabung dengan Provinsi Jawa Barat ini dimenangi oleh Partai Majelis Syuro Indonesia (Masyumi). Partai berideologi Islam ini memang mendominasi wilayah Sumatera pada waktu itu.

Berbagai pemilu tersebut mengindikasikan bahwa pilihan politik masyarakat Banten sering berubah. Apakah ini berarti menyalahi pandangan

Herbert Feith²¹ (1999) yang mengungkapkan bahwa preferensi politik masyarakat Jawa relatif tetap, termasuk Banten, yaitu masih bersandar pada politik aliran?

Jika merujuk pandangan Feith tersebut, apabila pemilihannya berdasarkan politik aliran yang lebih luas, yakni partai-partai Islam dan nasionalis-sekuler, pandangan tersebut masih terbukti kebenarannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penggabungan perolehan suara partai-partai berideologi Islam dan berbasis massa Islam, dilawankan dengan perolehan suara gabungan partai-partai sebaliknya, nasionalis-sekuler. Hasilnya tetap, gabungan suara partai-partai Islam meraih sekitar 40 persen, sedangkan partai-partai nasionalis-sekuler mendapat kurang lebih 60 persen. Proporsi ini hampir sama antara Pemilu 1955, Pemilu 1999, dan Pemilu 2004.

Akan tetapi, jika dilihat secara rinci berdasarkan perolehan suara masing-masing partai dari ke tiga pemilu tersebut terus berubah. Tidak ada partai politik yang stabil mempertahankan perolehan suaranya di sini. Meskipun secara keseluruhan pilihan politik masyarakatnya terhadap partai sering berubah, hal itu ternyata tidak terjadi di semua bagian wilayahnya. Perbedaan dari sisi perubahan politik ini lebih terasa apabila dipilah antara wilayah utara dan selatan Banten.

5. Realitas Politik Perempuan di Propinsi Banten

Pemilu tahun 2009 yang sangat demokratis tersebut, tetap melahirkan diskursus. Salah satu aspek yang selalu muncul dalam diskursus ini adalah persoalan representasi kaum perempuan dalam struktur politik nasional maupun daerah, termasuk pula keterlibatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik di pusat hingga daerah yang dirasakan belum cukup memadai. Persoalan ini muncul terutama bila membandingkannya secara dikotomis dengan eksistensi kaum perempuan dalam konteks kuantitatif yang rata-rata sebanding dengan setengah populasi nasional maupun daerah.

Realitas partisipasi politik kaum perempuan di lembaga legislatif sejak tahun 1999 hingga 2004 di Propinsi Banten yang baru berkisar pada angka 8,8% di tingkat pusat, 6,6% di tingkat Provinsi, dan 2% di tingkat Kabupaten/kota, merupakan gambaran nyata partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal yang sering digunakan sebagai dasar argumentasi pentingnya penguatan peran mereka melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat afirmatif terhadap potensi yang dimiliki kaum perempuan tersebut. Angka tersebut sedikit meningkat di tahun 2009 yaitu

²¹ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Second Edition, Ithaca New York: Cornell University Press. 1971

sebesar 11 % di pusat dan 18,8 % di tingkat Provinsi Banten, serta pada tingkat kabupaten dan kota rata-rata 13,7 %.²²

Begitu juga dari aspek politik di Provinsi Banten, berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2009 diperoleh gambaran yang kurang lebih sama dengan realitas di atas, dimana ditemukan kenyataan proporsi anggota DPRD laki-laki jauh lebih besar (82,4%) bila dibandingkan dengan jumlah perempuan yang hanya berkisar pada angka 17,7%. Demikian juga pada kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi Banten. Di Kabupaten Pandeglang perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif hanya sebesar 10%, Kabupaten Tangerang sebesar 8%, Kota Tangerang sebesar 12%, Kota Cilegon sebesar 20%, Kabupaten Lebak sebesar 16%, Kota Serang sebesar 17,8%, Kabupaten Serang sekitar 8%, dan Tangerang Selatan sebesar 15,6 %. Jumlah ini tentu sangat ironis bila dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan yang hampir setara dengan pemilih laki-laki (49,46% dan 50,54%) pada tahun 2009.²³

Fakta-fakta tersebut, yang kemudian sering menimbulkan prasangka sosial adanya ketimpangan gender, yang direfleksikan dari realitas keterwakilan perempuan secara fisik dalam lembaga legislatif yang sangat minim, yang kemudian berpeluang pada tidak terwakilinya aspirasi kaum perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik yang sensitif gender atau berpihak pada kepentingan perempuan maupun isu-isu yang terkait langsung dengan kehidupan dan hak-hak kaum perempuan. Isu-isu ini yang kemudian dikenal dengan isu-isu *soft-politics* atau *conventional politics*, yang dianggap menjadi domain kaum perempuan dan hanya dapat dipahami dan diempati oleh kaum perempuan. Isu-isu ini secara politik memang seringkali dianggap bukan sebagai isu politik sehingga nyaris tidak masuk dalam ranah kehidupan dan cara berpikir politik kaum laki-laki, yang antara lain menyangkut masalah-masalah: kesejahteraan anak, perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan dan sebagainya. Dalam konteks inilah keyakinan terhadap keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam politik menjadi sangat penting guna mengurangi kesenjangan antara isu-isu *conventional politics* dan *hard politics*. Hal ini cukup beralasan mengingat bahwa sikap politik kaum perempuan umumnya lebih cenderung mementingkan isu-isu *conventional politics* daripada *hard politics*.

Dalam konteks pilihan politik perempuan yang umumnya tidak muncul secara otonom karena kesadaran kritisnya terhadap pilihan-pilihan yang ada, melainkan dipengaruhi oleh cara pandang dan pilihan suami mereka masing-masing. Namun demikian seluruh informan setuju dan

²² Bappeda Prov. Banten, 2010

²³ KPU Propinsi Banten 2009.

mengakui bahwa fenomena ini mulai agak berubah pada pelaksanaan Pemilihan Presiden tahun lalu, yang menurut mereka mengindikasikan adanya “perlawanan perempuan” terhadap pilihan suami mereka, kendati itu dilakukan secara tertutup. Kecenderungan ibu-ibu dan kaum perempuan umumnya memilih calon yang populer dan memiliki penampilan fisik paling menarik, merupakan fakta mulai bekerjanya pilihan otonom kaum perempuan, kendati itu masih sangat jauh di bawah nilai pilihan kritis yang ideal.

a. Pandangan masyarakat Terhadap Politisi Perempuan

Persepsi memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas partisipasi politik seseorang. Persepsi yang baik cenderung akan melahirkan sikap-sikap simpati hingga empati yang kemudian berkorelasi dengan tipe partisipasi yang muncul. Sementara persepsi yang buruk cenderung akan melahirkan sikap antipati hingga apatisme. Untuk kepentingan praktis, telaahan mengenai persepsi juga penting dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan memetakan bagaimana gambaran partisipasi perempuan sebagaimana dipaparkan di atas.

Berdasarkan hasil survey bahwa sebagian besar masyarakat Banten baik laki-laki maupun perempuan memilih politisi laki-laki yang pantas menjadi politisi, dengan alasan; pertama, laki-laki pantas untuk menjadi pemimpin. Kedua, alasan agama yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Ketiga, karena lebih dikenal. Keempat, lebih komunikatif serta berwibawa, dan kelima, mempunyai waktu yang cukup untuk mobilisasi dan mobilitas. Sedangkan alasan sebaian informan tidak memilih politisi perempuan dengan alasan; pertama, atas anjuran agama. Kedua, tidak banyak dikenal. Ketiga, cukup mengurus rumah saja. Keempat, kurang sosialisasi dan kelima, pemimpin harus laki-laki. Akan ada sebagian kecil informan yang memilih perempuan untuk menjadi wakil rakyat dengan alasan; pertama, informan mengenalnya. Kedua, rajin bersosialisasi dan ketiga, karena keluarga.

Alasan-alasan tersebut secara umumnya memiliki pandangan yang sama bahwa persepsi perempuan terhadap segala kegiatan atau urusan dalam ranah publik bukan merupakan kewajiban maupun tanggung jawabnya, seperti: masalah pemerintahan, pembangunan, politik, dan lain-lain. Namun demikian, ketika ditanyakan bagaimana tanggapannya terhadap politisi perempuan, sebagian besar informan menganggap hal tersebut sebagai hal yang luar biasa, sebab pada umumnya kaum perempuan di perdesaan sudah sangat tesita waktu dan perhatiannya terhadap masalah-masalah keluarga sehingga kualitas dan intensitas keterlibatannya dalam ranah publik umumnya terpinggirkan secara alamiah. Dalam kaitan dengan itu, menurut

para informan, peran perempuan sebenarnya jauh lebih berat karena ternyata perempuan tidak hanya menjalankan peran-peran domestik seperti yang selama ini dipahami, bahkan 3 peran sekaligus sebenarnya telah mereka jalankan. Artinya bila ada perempuan yang mampu eksis di ranah publik tanpa mengabaikan peran-peran alamiahnya berarti perempuan itu adalah perempuan luar biasa.

Ketiga peran yang dimaksud di atas yaitu: (1) peran domestik yang terkait dengan tanggung jawab mereka terhadap urusan-urusan rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, melayam suami dan lain-lain; (2) peran produktif yang terkait dengan tanggungjawab mereka dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan uang dan meringankan beban ekonomi keluarga; dan (3) peran sosial yaitu tanggungjawab untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan mewakili keluarga, seperti berorganisasi dan berkumpul dengan kelompok masyarakat yang lain, kegiatan PKK, arisan, pengajian, posyandu, serta pengajian/ majelis taklim.

Secara umum ada pengakuan dari para informan bahwa peran-peran domestik yang inheren dalam diri keperempuanan mereka secara alamiah tersebut diberi nilai yang lebih rendah oleh laki-laki dan bahkan dianggap sebagai kewajiban semata, sementara peran-peran sosial dan produktif yang dilakukan perempuan harus selalu disesuaikan dengan stereotipe perempuan, dan tentu harus pula selalu berkorelasi dengan peran-peran domestik tersebut. Peran-peran domestik (reproduktif) yang dinilai lebih rendah dari nilai-nilai produktif ini tentu berdampak pada terjadinya domestikasi peran perempuan menjauhkan peran perempuan dari arus politik yang sebenarnya tidak harus dan tidak ada kaitan sama sekali dengan soal-soal publik di atas. Dan karena peran-peran ini dianggap sebagai kewajiban semata maka peran-peran publiknya tidak dianggap penting, sekunder bahkan tertier, dan fakultatif karena hanya berfungsi untuk mengisi waktu luang atau membantu keluarga atau suami. Domestikasi peran perempuan ini berdampak pada lemahnya posisi tawar perempuan di wilayah publik, khususnya dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang mengarusutamakan gender hingga akhirnya perempuan menjadi ter subordinasi dalam masyarakat.

b. Posisi Agama Dalam Kiprah Politisi Perempuan di Banten

Masyarakat Banten yang sangat religius, tidak mudah bagi politisi perempuan untuk meraih dukungan politik, sebab realitas masyarakat memberikan pandangan yang cukup berbeda antaralain ada sebagian pendapat kiyai yang berpandangan bahwa yang berhak menjadi pemimpin itu adalah laki-laki dengan mengemukakan dasar-dasar hukumnya. Akan tetapi ada pula yang berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan sama saja

atau setara dalam Islam, sehingga yang dilihatnya adalah kompetensinya untuk mengurus umat dengan mengemukakan dasar-dasar hukumnya.

Perbedaan cara pandang tersebut dijadikan motivasi bagi politisi perempuan di Banten untuk membuktikan bahwa mereka mampu mengamban amanah politik tersebut, serta mampu membawa kemajuan bagi Banten. Mereka pun berpandangan bahwa berpolitik adalah bagian dari ibadah amar ma'ruf nahi munkar, dimana setiap muslim berkewajiban untuk melakukannya ditempat dan waktu yang dimilikinya atau yang dihadapinya. Dengan berpolitik bagi mereka memungkinkan untuk menjaga agar umat terhindar dari kemunkaran sebagian pihak yang menghendaki klerusakan moral umat, dengan demikian mereka akan mampu menjaganya melalui pendekatan konstitusi/huim positif dengan mengeluarkan perda-perda yang sesuai dengan syari'ah.

G. Kesimpulan

Masyarakat Banten merupakan masyarakat yang kental dengan nilai-nilai religius, sehingga setiap peristiwa dan perilaku sering dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Seiring dengan hal tersebut, pandangan masyarakat Banten terhadap politisi perempuan dikaitkan pula dengan nilai-nilai agama sehingga masyarakat Banten baik laki-laki maupun perempuan ketika pemilu legislatif 2009 banyak memilih laki-laki menjadi wakil rakyat dengan alasan doktrin agama. Adapun keterpilihan politisi perempuan menjadi wakil rakyat, karena adanya paradigma yang berbeda juga politisi perempuan tersebut dikenal dan rajin melakukan sosialisai. Dengan demikian agama masih menjadi parameter masyarakat Banten dalam menentukan pilihan politik dengan mengacu pada fatwa-fatwa agama baik yang mengikuti pemahaman klasik maupun moderat, akan tetapi hal tersebut dipengaruhi juga dengan perilaku politisi agar melakukan sosialisasi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam, *Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Engineer, Ashgar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terjemahan Farid Wajdi dan Cici Farhah, Jogjakarta: Banteng Budaya, 1994.

Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, second edition, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1971.

Kencana, Inu, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Miles, Matthew B dan Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, terjemahan Tjeep Rohendi Rohidi, 1992

Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Wadud, Aminah, *Wanita di Dalam AlQuran*, Bandung: Pustaka, 1994

Wijaya, Albert dalam Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Penjelasannya

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik